

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
(Studi Toko Modern Di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang
Tahun 2025)**

Oleh

**Bunga Crysanda Putri
Nim.220501001**

ABSTRAK

Kelurahan Batu IX dengan kepadatan penduduk yang tinggi mengalami lonjakan sampah plastik dari swalayan lokal, sehingga memperparah krisis lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet yang kini dalam kondisi siaga kritis. Tujuan Penelitian Menganalisis secara mendalam implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada kategori toko modern di wilayah Kelurahan Batu IX. Metode Penelitian Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan teori George C. Edward III yang mengkaji indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung bersama informan kunci, mencakup Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (Ibu Anna Primadona, S.E.), pengelola administrasi swalayan lokal (Swalayan Pinang Sentosa), karyawan kasir ritel modern (Isana Minimarket dan Swalayan Kurnia), serta masyarakat konsumen di Kelurahan Batu IX, serta data sekunder berupa dokumen Perwali No. 14 Tahun 2022, struk belanja, dan dokumentasi lapangan. Hasil Penelitian Pelaksanaan regulasi belum berjalan dengan baik. Alur transmisi informasi formal dari DLH belum terserap merata oleh swalayan lokal menengah, petunjuk teknis kriteria kantong belanja ramah lingkungan dan mekanisme biaya plastik berbayar dua ratus rupiah masih belum jelas, serta DLH tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan sanksi denda langsung. Keterbatasan anggaran operasional, minimnya personil pengawas, ketiadaan database administratif spasial sebaran toko modern aktif, dan tidak tersedianya Prosedur Operasional Standar (SOP) pengawasan baku menyebabkan sebagian pemilik swalayan mengambil keputusan kompromi untuk tetap menyediakan kantong plastik sekali pakai secara gratis demi mengamankan omzet usaha dan mencegah konflik dengan konsumen di meja kasir. Kendati demikian, ritel nasional seperti Isana Minimarket menunjukkan respons proaktif dengan menempelkan salinan peraturan di toko dan menyediakan kantong ramah

lingkungan berbayar. Kesimpulan Implementasi regulasi belum berjalan optimal akibat ketiadaan instruksi teknis yang detail, rendahnya frekuensi pengawasan harian, serta pola koordinasi antarinstansi yang masih bersifat sektoral mandiri tanpa melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah Kelurahan Batu IX secara terpadu di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengurangan Kantong Plastik, Toko Modern, George C. Edward III.



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
(Studi Toko Modern Di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang
Tahun 2025)**

Oleh

**Bunga Crysanda Putri
Nim.220501001**

Abstract

Batu IX Ward, with its high population density, is experiencing a surge in plastic waste from local supermarkets, worsening the landfill crisis at the Ganet Landfill (TPA), which is currently in a critical condition. Research Objective To analyze in depth the implementation of Tanjungpinang Mayor Regulation Number 14 of 2022 concerning the Reduction of Plastic Bag Usage in the modern store category in Batu IX Ward. Research Method A descriptive qualitative study based on George C. Edward III's theory examining communication, resources, disposition, and bureaucratic structure indicators. Research data sources consist of primary data obtained through in-depth interviews and direct observations with key informants, including the Head of Waste and B3 Waste Management Division of Tanjungpinang Environmental Agency (Mrs. Anna Primadona, S.E.), local supermarket administrative manager (Pinang Sentosa Supermarket), modern retail cashiers (Isana Minimarket and Kurnia Supermarket), and consumers in Batu IX Ward, as well as secondary data comprising Mayor Regulation No. 14 of 2022 documents, shopping receipts, and field documentation. Research Findings The regulatory implementation is not running well. Formal information transmission from DLH has not been evenly absorbed by medium local supermarkets, technical guidelines for eco-friendly shopping bag criteria and the two-hundred-rupiah paid plastic fee mechanism remain unclear, and DLH lacks legal authority to impose direct fine sanctions. Operational budget constraints, a shortage of monitoring personnel, the absence of a spatial administrative database of active modern stores, and the unavailability of Standard Operational Procedures (SOP) for monitoring lead some supermarket owners to make compromise decisions to continue providing free single-use plastic bags to secure business turnover and prevent conflicts with consumers at cashier counters. Nevertheless, national retail chains such as Isana Minimarket demonstrate a proactive response by displaying copies of the regulation in store and providing paid eco-friendly bags. Conclusion Policy implementation is not yet optimal due to the lack of detailed technical instructions, low frequency of

daily monitoring, and a sectoral-centric coordination pattern that does not actively involve the Municipal Police and Batu IX Ward government in an integrated manner in the field.

Keywords: *Policy Implementation, Plastic Bag Reduction, Modern Stores, George C. Edward III.*

